



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 031 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu adanya pedoman Pola Klasifikasi
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Th. 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Th. 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB I

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI

Pasal 1

Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

Pasal 3

Pedoman Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

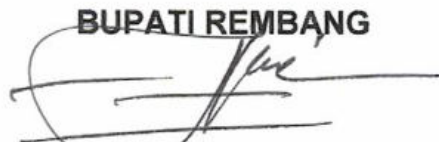
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Juli 2006

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	a.
AS. SEKDA	
KA. BAK. B. K. W.	↓
BAGAN ZONASI	
INSTANSI KANTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 33
SERI...6... NOMOR ...23....**

**PEDOMAN POLA KLASIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

KODE KLASIFIKASI BARU / TAMBAHAN

000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (untuk pegawai lihat 861 - 1)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan Secara Adat
002.6	Penghargaan lainnya (Cinderamata)
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun (HUT)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan lainnya
005	Undangan
006	Twida Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat Lainnya
007	Tanda gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011.1	Instalasi Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Bak
011.6	Hidrانت

011.7	Alarm
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah Untuk Rumah Dinas
012.2	Perabotan
013	Persinggahan
013.1	Mess
013.2	Wisma
013.3	Hotel
014	Akomodasi
015	Penerangan Listrik
016	Telepon
017	Keamanan / Tata Tertib Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata Tempat (pemasangan gambar Pres/Wapres)
019.3	Audiensi
019.4	Alamat-Alamat Kantor dan Pejabat
019.5	Penerimaan Tamu
019.6	Kerjasama
019.7	Bandir/Umbul-umbul
020	PERALATAN
020.1	Penawaran
021	Alat Tulis
022	Mesin Kantor
022.1	Manual
022.2	Elektronik
023	Perabot Kantor
024	Alat Angkutan
024.1	Orang
024.2	Barang
025	Pakaian Dinas
026	Senjata
027.1	Penunjukan Langsung
027.2	Lelang
028.1	Penghapusan
029	Pengurusan Kendaraan

030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Barang-barang tidak bergerak (tanah, kebun dll)
- 032 Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, dll)
- 033 Barang-barang tidak bergerak (monumen)
- 034 Alat-alat besar
- 035 Hewan
- 036 Barang, persediaan dalam gudang
- 037 Alat Pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatara kantor / pabrik
- 039 Peralatan rumah sakit

040 PERPUS'TAKAAN / DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI

- 041 Perpustakaan
 - 041.1 Perpustakaan umum
 - 041.2 Perpustakaan khusus
 - 041.3 Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - 041.4 Perpustakaan sekolah
 - 041.5 Perpustakaan Keliling
 - 041.6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - 041.7 Pelayanan
 - 041.8 Pemeliharaan
 - 041.9 Kerjasama antar perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - 045.1 Ekspedisi ke 2
 - 045.2 Surat Pengantar
 - 045.3 Salah Kirim
 - 045.4 Pola klasifikasi
 - 045.5 Penataan berkas
 - 045.6 Penyusutan Arsip
 - 045.61 Pemindahan Arsip
 - 045.62 Penyerahan Arsip
 - 045.63 Pemusnahan Arsip
 - 045.64 Jadwal Retensi Arsip
 - 045.65 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - 045.66 Daftar Pertelaan Arsip
 - 045.7 Pembinaan kearsipan
 - 045.71 Bimbingan teknis
 - 045.8 Pemeliharaan/perawatan arsip
 - 045.81 Fumigasi
 - 045.9 Pengawetan/konservasi

046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
049	-
050	PERENCANAAN Meliputi Rencana Pembangunan Lima tahun dan Perencanaan Umum Departemen Dalam Negeri. Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, Program Pembangunan Nasional (Propernas), Program Pembangunan Daerah (Properda) DUK, DIK, DUP, DASK, RASK, Laporan fisik dan Keuangan proyek Pembangunan, SIAP, Tender, Pemborong, Laporan Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Departemen, Musrenbangnas
050.1	Repelita
050.11	Pelita Daerah, tambah kode wilayah
050.12	Bantuan Pembangunan Daerah
050.13	Bapeda
050.2	Program Pembangunan Nasional (Propernas)
050.3	Program Pembangunan Daerah (Properda)
050.4	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
051	Bidang Pemerintahan Klasifikasikan disini : proyek Fisik Pemerintahan Tambahkan Perincian 100 pada 05 1 Contoh Proyek Kependidikan 051.86
051.1	DUP
051.2	DASK
051.3	RASK
052	Bidang Politik
052.1	Laporan Keuangan
052.2	Laporan Pelaksanaan Kinerja
053	Perencanaan Kegiatan Pembangunan
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan rincian 400 pada 054 Contoh : Proyek pasar : 054.671
055	Bidang Perekonomian Tambahkan rincian 500 pada 055 Contoh : proyek pasar : 055.112
056	Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan rincian 600 pada 056 Corrttoh : proyek jembatan : 056.3
057	Bidang Pengawasan
058	Bidang Kepegawaian
059	Bidang Keuangan
060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN

061	Organisasi
061.1	Susunan dan Tatakerja
061.2	Tata tertib kantor, jam kerja
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan International
064	Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata naskah dinas
065.2	Stempel
065.21	Stempel jabatan
065.22	Stempel dinas
065.3	Papan nama instansi pernerintah/non pemerintah
066	Tata Hubungan Kerja
066.1	Telaah Tata Hubungan
066.2	Penyusunan
066.3	Bimbingan
067	Sistem dan Prosedur
067.1	Telaahan
067.2	Penyusunan
067.3	Bimbingan
068	Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
068.1	Pemantauan Pelaksanaan
068.2	Sistem Prosedur Kerja
068.3	Evaluasi Pelaksanaan Sistem
068. 4	Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
069	Analisis jabatan dan pengukuran beban kerja
069.1	Analisis Jabatan
069.2	Hasil Analisis jabatan
069.3	Penilaian jabatan Struktural dan Fungsional
070	PENELITIAN
071	Riset
072	Survey
073	Kajian
074	Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri
075	Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta
076.	Kerjasania penelitian dengan LSM
077	Kerjasama penelitian dengan swasta (CV/PT)
078	Study Kelayakan

079	Study Kasus
080	KONPERENSI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen, Eselon lainnya
084	Instansi lainnya
085	International di Dalam Negeri
086	International di Luar Negeri
087	-
088	-
089	-
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
095	Perjalanan Tamu asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	-
109	-
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
111.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR

- 111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 113 Susunan Kabinet
- 113.1 Reshuffle
- 113.2 Penunjukan Menteri ad interim
- 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Departemen Dalam Negeri
- 114.1 Amanat Menteri Daerah
- 115 Departemen lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (DPA,MA,BPK)
- 117 Lembaga Non Departemen
- 118 Otonomi Desentralisasi
- 119 Kerjasama antar Departemen
- 120 PEMERINTAH PROPINSI**
- 120.04 Laporan daerah, tambahkan kode wilayah Monografi, tambahkan kode wilayah
- 120.1 Koordinasi
- 120.2 Instansi tingkat propinsi
- 120.21 Dinas Otonomi
- 120.22 Instansi Vertikal
- 121 Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
- 123 Sekretaris Wilayah / Daerah, tambahkan kode wilayah
Meliputi pencalonan , serah terima jabatan.
- 124 Badan-badan pertimbangan Daerah, meliputi Muspida.
- 125 Pembentukan / Pemekaran
- 125.1 Pembentukan daerah otonom
- 125.2 Pembentukan wilayah
- 125.3 Perubahan batas wilayah
- 125.4 Pemekaran wilayah
- 125.5 Penambahan ibu kota propinsi, pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan, dsb
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan

128	Swapraja
129	-
130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
130.1	Koordinasi
130.2	Instansi tingkat Propinsi
130.21	Dinas Otonomi
130.22	Instansi Vertikal
131	Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Wilayah / Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan , serah terima jabatan.
134	Badan-Badan Daerah, meliputi Badan Pertimbangan Daerah
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran Wilayah
135.5	Permasalahan Batas Wilayah
135.6	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten/ Kotamadya
135.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Unisan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/pengarahan/amanat
138.2	Pembentukan kecamatan
138.3	Pemekaran kecamatan
138.4	Perluasan/perubahan batas wilayah kecamatan
138.5	Pemindahan ibu kota kecamatan
138.6	Laporan Kecamatan
139	-
140	PEMERINTAHAN DESA
141	Pemerintahan Desa, Kelurahan
141.1	Kepala desa, kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, dsb
141.11	Biaya pemilihan kepala desa
141.2	Lembaga Musyawarah Desa, meliputi pembentukan, keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan LMD
141.3	Perangkat desa, kelurahan
141.31	Sekretaris desa, kelurahan meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
141.32	Kepala Dusun, meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian,

pemberhentian sementara

- 142 Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
 - 142.1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Desa)
 - 142.2 Pembangunan
 - 142.3 Anggaran Belanja Tambahan
 - 142.4 Pendapatan desa
 - 142.41 Urusan desa
 - 142.42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - 142.43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi
 - 142.44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 142.45 Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa
 - 142.46 Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa
 - 142.47 Pendapatan asli desa
 - 142.48 Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 142.49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - 143.1 Tanah hak pakai desa
 - 143.11 Tanah bengkok
 - 143.12 Tanah titisara
 - 143.13 Tanah penganggonan
 - 143.14 Tanah desa lainnya
- 144 Lembaga-lembaga tingkat desa
 - 144.1 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - 146.1 Pemekaran desa/kelurahan
 - 146.2 Pembentukan desa/kelurahan
 - 146.3 Perubahan batas wilayah/perluasan desa/kelurahan
 - 146.4 Perubahan nama nama desa/kelurahan
 - 146.5 Permasalahan batas desa
 - 146.6 Penyatuan desa/kelurahan
 - 146.7 Penghapusan desa/kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga tingkat Desa jangan diklasifikasikan disini.
Lihat 410 dengan perinciannya
- 148 Pembangunan desa
 - 148.1 Pembinaan usaha gotong royong
 - 148.11 Swadaya gotong royong
 - 148.12 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - 148.13 Latihan Kerja Masyarakat
 - 148.14 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - 148.15 Penyuluhan
 - 148.16 Kelembagaan Desa
 - 148.2 Perekonomian Desa
 - 148.21 Produksi Desa
 - 148.22 Keuangan desa
 - 148.23 Koperasi desa

148.24	Penataan bantuan pembangunan desa
148.25	Alokasi bantuan pembangunan desa
148.26	Pelaksanaan bantuan pembangunan desa
148.3	Prasarana desa
148.31	Pembinaan
148.32	Bimbingan teknis
148.33	Pemukiman kembali penduduk
148.34	Masyarakat pradesa
148.35	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
148.4	Pengembangan desa
148.41	Tingkat perkembangan desa
148.42	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
148.43	Tata Desa
148.44	Perlombaan desa
148.5	Koordinasi
148.51	Sektor khusus (K)
148.52	Rapat koordinasi horizontal (RKH)
148.53	Team koordinasi pusat
148.54	Kerjasama

149 RT-RW/RK

150 LEGISLATIF MPR / DPR

151	Kecanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran

152 Persidangan

153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan

154 Hak

155	Kecanggotaan DPR
155.1	Pencalonan
155.2	Pengangkatan
155.3	Pemberhentian
155.31	Recall
155.32	Meninggal
155.4	Pelanggaran

156	Persidangan
156.1	Sidang Pleno
156.2	Dengar Pendapat
156.3	Rapat Komisi
156.4	Reses

157	Kesejahteraan
157.1	Keuangan

157.2	Penghargaan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD PROPINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan
161.3	Pemberhentian
161.31	Recall
161.32	Meninggal
161.4	Pelanggaran
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.2	Dengar Pendapat
162.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
162.4	Fraksi
162.5	Tata tertib
162.6	Reses
162.7	Peninjauan study banding
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Propinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN/KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Pemberhentian
171.31	Recall
171.32	Meninggal
171.4	Pelanggaran
172	Persidangan
172.1	Sidang Pleno
172.2	Dengar pendapat
172.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
172.4	Fraksi
172.5	Tata tertib
172.6	Reses
172.7	Peninjauan study banding

173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	H a k
175	Sekretaris DPRD Kab/Kota
176	-
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang -Undang Dasar
180.2	GBHN
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
182	Pidana
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis peradilan
183.11	Peradilan umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Pengadilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Agama Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	PeradilanTata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verzet
183.24	Peninjauan kembali
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum
183.41	Pembinaan kesadaran hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan hukum
183.51	Lembaga bantuan hukum
184	Hukum Internasional

185	Imigrasi
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
189	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar negeri
195	PBB
196	Laporan Luar negeri
197	-
198	-
199	-
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan Idiologi Pancasila
201.2	Kesatuan bangsa organisasi kekuatan sosial politik
201.3	Organisasi kemasyarakatan
201.4	Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya
201.5	Keadaan politik luar negeri
201.6	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
201.7	Hasil evaluasi dan Tata mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas
201.8	PARPOL
201.81	Pendirian/pembentukan PARPOL
201.82	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
201.83	Program kerja, data kegiatan PARPOL
201.84	Pembinaan PARPOL
201.85	Hasil Munas/Musda PARPOL
201.86	Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL
201.87	Data inventaris dan keuangan PARPOL
201.9	Partai/organisasi terlarang
201.91	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
201.92	Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang
201.93	Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
201.94	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi/anggota partai/organisasi terlarang
202.1	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
202.2	Organisasi Kemasyarakatan
202.3	Pembentukan organisasi
202.4	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

202.5	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
202.6	Program kerja organisasi
202.7	Munas/Musda TKI dan TK. II
202.8	Pembinaan organisasi
202.81	Kegiatan organisasi
202.82	Daftar inventarisasi kekayaan organisasi
202.83	Lembaga Swadaya Masyarakat
202.84	Pembentukan organisasi
202.85	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
202.86	Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi
202.87	Program kerja organisasi
202.88	Laporan kegiatan organisasi

203 Orde Baru

204 Orde Pemerintahan

205 -

206 -

207 -

208 -

209 -

210 KEPARTAIAN

211 Partai Demokrasi Indonesia

212 Golongan Karya

213 Partai Persatuan Pembangunan

214 Partai Peserta Pemilu

215 -

216 -

217 -

218 -

219 -

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

221 Berdasarkan Perjuangan

221.1 Perintis Kemerdekaan

221.2 Angkatan 45

221.3 Veteran

222 Berdasarkan kekaryaan

222.1 PEPABRI

222.2 Wreda Tama

222.3 Pensiunan PNS

223 Berdasarkan Kerokhanian

223.1 Muhamadiyah

223.2 NU

223.3 Persatuan Tarikat Islam

223 LSM

224 -

225	-
226	-
227	-
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Arsiparis Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda marhaenis
247	-
248	-
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	-
256	-
257	-

258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Konggres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	-
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Tanda gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
277	Pemungutan suara
278	Hasil pemilu
279	KPU
280	PANWASLU
281	Pelanggaran pemilu
282	Pemantau pemilu
283	Sengketa pemilu
284	-
285	-
286	-
287	-
288	-
289	-
290	-

291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

300.1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
300.5 Laporan dari instansi yang berwenang
300.6 Laporan adanya kejadian teroris
300.7 Pengamanan sidang (tamu negara)
300.8 Pengawasan pejabat

301 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum(Trantibum)

302 Pengawasan Trantibum

303 Penegakan pelaksanaan Perda

304 Pembinaan/penyuluhan pelanggaran Perda

305 Patroli wilayah

306 -

307 -

308 -

309 -

310 PERTAHANAN

311 Darat

312 Laut

313 Udara

314 -

315 -

316 -

317 -

318 -

319 -

320 KEMILITERAN/TNI

321 Latihan Militer

322 Wajib Militer

323 Operasi Militer

- 324 Kekaryaan ABRI
Pejabat Sipil dari ABRI klasifikasikan Dwifungsi ABRI
- 325 -
- 326 -
- 327 -
- 328 -
- 329 -

330 KEAMANAN

- 331 Kepolisian
- 331.1 Polisi Pamong Praja
- 332 Huru-hara / Demonstrasi
- 333 Senjata Api/ tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat kaleng
- 337 -
- 338 -
- 339 -

340 PERTAHANAN SIPIL

- 340.1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
- 340.11 Pengangkatan/pemberhentian anggota Hansip
- 340.12 Pengerahan dan pengendalian Hansip
- 340.13 Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
- 340.14 Pembinaan anggota Hansip/Linmas
- 340.15 Penghargaan anggota Hansip
- 340.16 Hansip/Linmas lanjut usia
- 340.17 Data Matrik Hansip dan Menwa
- 340.18 Pendidikan/latihan Hansip dan Menwa
- 340.19 Latihan Ketrampilan PAM Swakarsa
- 340.2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
- 340.21 Orintasi kesadaran bela negara bagi tokoh
- 340.22 Pemberian tali asih bagi anggota
- 341 -
- 342 -
- 343 -
- 344 -
- 345 -
- 346 -
- 347 -
- 348 -
- 349 -

350 KEJAHATAN

- 351 Makar / Pemberontakan

352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, pencurian / perampasan
354	Subversi / penyelundupan / narkotika
355	Pemalsuan
355.1	Uang
355.2	Ijasah
355.3	Kejahatan pemalsuan lainnya
356	Korupsi / penyelewengan / penyalahgunaan jabatan
357	Perkosaan / perbuatan cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya
360	BENCANA
361	Gunung berapi / gempa
362	Banjir / tanah longsor
363	Angin topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam kebakaran
365	Kekeringan
366	-
367	-
368	-
369	-
370	KECELAKAAN (Klasifikasi disini : SAR)
371	Latihan SAR anggota Menwa
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan lalu lintas jalan raya
378	Kecelakaan udara
379	Kecelakaan laut

380 -
381 -
382 -
383 -
384 -
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -

390 -
391 -
392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 -
398 -
399 -

400 KERSEJAHTERAAN RAKYAT

401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -

410 PEMBANGUNGAN DESA

411 Pembinaan usaha gotong royong
411.1 Swadaya gotong royong
411.11 Penataan gotong royong
411.12 Gotong royong dinamis
411.13 Gotong royong statis
411.14 Pungutan
411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.21 Pembinaan
411.22 Klasifikasi
411.23 Proyek
411.24 Musyawarah
411.3 Latihan Kerja Masyarakat
411.31 Kader Masyarakat
411.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33 Pusat Latihan
411.34 Kursus-kursus
411.35 Kurikulum / Sylabus
411.36 Ketrampilan
411.37 Pramuka
411.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.41 Program

411.42	Pembinaan Organisasi
411.43	Kegiatan
411.5	Penyuluhan
411.51	Publikasi
411.52	Peragaan
411.53	Sosio Darma
411.54	Siaran Pedesaan
411.55	Penyuluhan Lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun tani
411.63	S u b a k
411.64	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Keuangan Desa
412.21	Perkreditan Desa
412.22	Inventarisasi Data
412.23	Perkembangan / Pelaksanaan
412.24	Bantuan / Simulasi
412.25	Petunjuk / Pembinaan pelaksanaan
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Usaha Unit Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.41	Jumlah Desa yang diberi bantuan
412.42	Pengarahan
412.43	Pusat
412.44	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.51	Pusat
412.52	Daerah
412.6	Perlaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
412.61	Bantuan Langsung
412.62	Bantuan Keserasian
412.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Prasarana Desa
413.1	Prasarana Desa
413.11	Pembinaan
413.12	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman Kembali Penduduk
413.21	Lokasi
413.22	Diskusi
413.23	Pelaksanaan
413.3	Masyarakat Pradesa
413.31	Pembinaan
413.32	Penyuluhan
413.4	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
413.41	Rumah Sakit
413.42	Proyek perintis Pelaksanaan
413.43	Pengembangan
413.44	Perbaikan Kampung

414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat perkembangan desa
414.12	Jumlah desa
414.13	Pemekaran desa
414.14	Pembentukan desa baru
414.15	Evaluasi
414.16	Bagian
414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
414.21	Penyuluhan Program/Fasilitas Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan / Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa/Profil desa dan kelurahan
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyuluhan Pola Tata Desa
414.33	Pemetaan
414.34	Pedoman Pelaksanaan
414.35	Evaluasi
414.4	Perlombaan Desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam

415	Koordinasi
415.1	Sektor Khusus (K)
415.2	Rapat Koordinasi Horisontal
415.3	Team Koordinasi Pusat (PKP)
415.4	Kerjasama
415.41	Luar Negeri (Unicef)
415.42	Perguruani tinggi
415.43	Departemen / Lembaga Non Departemen

416	-
417	-
418	-
419	-

420 PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus
(Klasifikasi disini : Pendidikan Putera-puteri Irian Jaya)

421	Sekolah
421.1	Pra Sekolah
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Tinggi
421.5	Sekolah Kejuruan
421.6	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar
	Reuni, Darmawisata, Lomba
	Klasifikasi disini : Pelajar teladan, Pertukaran pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan luar sekolah/pemberantasan buta huruf

- 422 Administrasi Sekolah
- 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian Pendaftaran, mapram, perpeloncoan, OSPEK
- 422.2 Tahun Pelajaran
- 422.3 Hari libur
- 422.4 Uang Sekolah Klasifikasi disini SPP
- 422.5 Bea Siswa
- 422.6 Ijazah

- 423 Metode Belajar
- 423.1 Kuliah
- 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
- 423.3 Diskusi
- 423.4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN
- 423.5 Kurikulum
- 423.6 Karya Tulis, Karya ilmiah
- 423.7 Ujian

- 424 Tenaga Pengajar
- Guru, Dosen, Dekan, Rektor
- Klasifikasi disini : guru teladan

- 425 Sarana Pendidikan
- 425.1 Gedung
- 425.11 Gedung Sekolah
- 425.12 Kampus
- 425.13 Pusat Kegiatan
- 425.14 Perpustakaan
- 425.15 Laboratorium
- 425.2 B u k u
- 425.3 Perlengkapan Sekolah
- 425.4 Sistem informasi pendidikan

- 426 Keolahragaan
- 426.1 Cabang olah raga
- 426.2 Sarana
- 426.21 Gedung Olah Raga
- 426.22 Stadion
- 426.23 Lapangan
- 426.24 Kolam Renang
- 426.3 Pesta Olah Raga
- Klasifikasi disini : PON, PORSADA, Olimpiade, PORSENI
- 426.4 Hobby

- 427 Kepemudaan
- Meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi disini : gelanggang remaja

- 428 Kepramukaan

- 429 Pendidikan Kedinasan
- Untuk Departemen Dalam Negeri lihat 890

- 430 KEBUDAYAAN**

- 431 Kesenian

431.1	Cabang Kesenian
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan
436	Kepercayaan
437	Festival, pentas seni
438	-
439	-
440	KESEHATAN
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	M a t a
441.3	J i w a
441.4	Kanker
441.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
441.6	Perawatan
441.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
441.8	Kesehatan ibu dan anak
441.9	Sistem Kesehatan Nasional
441.91	JPSBK (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Penyimpanan
442.3	Obat generik
442.4	Pemalsuan
442.5	Obat terlarang
443	Pemberantasan Penyakit
443.1	Pencegahan
443.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T .B.C
443.3	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.31	Kholera
443.32	Imunisasi
443.33	Survailense

443.34	Antrak
443.35	Leptosirosis
443.36	Chikungunya
443.37	SARS
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P.2.B)
443.41	Malaria
443.42	Dengue Haemorrhagic Fever (Demam Berdarah, DHF)
443.43	Fi laria
443.44	Serangga
443.45	Rabies
443.5	Higiene sanitasi
443.51	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman; jasa boga (TPPMM)
443.52	Sarana air minum
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Pernberantasan penyakit tidak menular
443.61	A. Pektoris
443.62	I M A
443.63	Hipertensi
443.64	Stroke
443.65	Diabetes Militus (DM)
443.66	CA. Service
443.67	CA. Mammae
443.68	CA. Hepar
443.69	CA. Paru
443.7	DEKOPENSATIOKORDIS
443.71	PPOM
443.72	Asma
443.73	Kecelakaan Lalu lintas
443.74	Psikosis
444	G i z i
444.1	Kekurangan makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok endemik (GAKY)
445	Rumah Sakit
445.1	RSUP
445.2	Rumah Sakit Jiwa
445.3	Rumah Sakit Mata
445.4	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
445.5	Poliklinik (Balai Kesehatan)
445.6	Rumah Bersalin
445.7	Posyandu
445.8	Rumah Sakit/Balai Kesehatan lainnya
445.9	Laboratorium Kesehatan
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
446.2	Diklat Tenaga Kesehatan (medis)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan (para medis)

446.4	Pendidikan Kesehatan
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Pengadaan alat kesehatan
447.2	Penyimpanan alat kesehatan
447.3	Standarisasi alat kesehatan
447.4	Penghapusan alat kesehatan
448	Pengobatan tradisional
448.1	Pijat
448.2	Tusuk jarum
448.3	Jamu tradisional
448.4	Dukun
449	Perijinan
449.1	Surat Ijin Praktek (SIP)
449.2	Surat Ijin Kerja (SIK)
450	AGAMA
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Fitrah
451.13	Puasa
451.14	Haji (jangan diklasifikasikan disini. Lihat 456)
451.2	Rumah Sholat
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan
451.41	Tinggi
451.42	Menengah
451.43	Dasar
451.44	Pondok Pesantren
451.45	Gedung Sekolah
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	B u k u
451.48	D a k w a h
451.49	Organisasi / lembaga pendidikan
451.5	Harta Agama Wakaf, Baitalmal dsb
451.6	Pendidikan
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik, Majelis Ulama
451.8	Peribadatan
452	Protestan
4 52.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadat
452.3	Tokoh .Agama, Rokhaniawan, Pendeta, Domine
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katholik
4 53.1	Peribadatan
453.21	Rumah Ibadat
453.3	Tokoh Agama. Rokhaniawan. Pastur
453.4	Mazhab
453.5	Organisasi Gerejani

454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadat
454.3	Tokoh Agama. Rokhaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	B u d h a
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadat
455.3	Tokoh Agama. Rokhaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Urusan Haji
457	-
458	-
459	-
460	S O S I A L
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
461.1	Cacat mata
461.2	Cacat tubuh
461.3	Cacat mental
461.4	Bisu / tuli
462	Tuna Sosial
462.1	Gelandangan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak / keluarga
463.1	Anak putus sekolah
463.2	Ibu teladan
464	Pembinaan Pahlawan
4611	Pahlawan
	meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya.
464.2	Perintis Kemerdekaan
	meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan
	meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dan sebagainya
466.3	Panti Asuhan

467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat Suku Terasing meliputi : Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dan sebagai nya
468	P M I
469	M a k a m
469.1	U m u m
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN
471	Kewarganegaraan Indonesia
471.1	WNI Asli
4.71.2	WNI Keturunan Asing
471.21	Permohonan kewarganegaraan
471,22	Permohonan ganti nama .
471.3	Asimilasi
472	Kewarganegaraan Asing
473	Tidak berkewarganegaraan (state less)
474	Pendaftaran Penduduk
474.1	Kelahiran
474.11	Adopsi
4712	Perkawinan / perceraian / rujuk
474.3	Kematian
474.4	Kartu Penduduk
475	Transmigrasi
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.11	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
475.12	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.13	Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
475.14	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.15	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
475.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.17	Kerja sama di bidang transmigrasi
475.18	Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik
475.2	Permukiman transmigrasi
475.21	Penggunaan tanah permukiman transmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
475.24	Teknis ruang satuan permukiman dan lokasi/peta informasi permukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/ social dan jaringan transportasi
475.26	Tanah permukiman, pengaduan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi,

- pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi permukiman transmigrasi
- 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.282 Rancangan kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan Pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
- 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.286 Pengukuran batas unit pemukiman
- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475.294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475.295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
- 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan transmigran
- 475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
- 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
- 475.344 Pengawasan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 Pendataan transmigran dilokasi yang masih dibina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi disetiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
- 475.41 Pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475.412 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
- 475.413 Penyusunan calon peserta / pelatih
- 475.42 Penampungan transmigran di transito
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan perbekalan/peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
- 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
- 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.514 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
- 475.52 Pembinaan pendidikan
- 475.521 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
- 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat

- 475.54 Pembinaan kesehatan
- 475.541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- 475.543 Pendistribusian bantuan pangan
- 475.55 Pembinaan rohani
- 475.551 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial

475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi

475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan

475.58 Penilaian transmigran teladan

475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

476 Keluarga Berencana

476.1 Alat kontrasepsi

476.2 KB Lestari

476.3 KB Mandiri

476.4 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)

476.5 Pos KB desa

477 Catatan Sipil

478 -

479 -

480 MEDIA MASA

481.1 Penerbitan

481.11 Surat Kabar

481.12 Majalah

481.13 Buletin

481.14 Klarifikasi Berita

481.15 Press Reliase

481.16 Layanan Informasi/Leaflet

481.17 Masukan Analisis Gubernur

481.18 Jurnal Mingguan Ringkasan Berita

481.19 Jurnal Mingguan Pendapat Umum

481.2 Liputan Media Masa

481.21 Liputan Rutin

481.22 Liputan Khusus

481.221 Arus Lebaran

481.222 Pemberangkatan dan Kepulangan Haji

481.3 Pencabutan Surat Ijin

481.31 Surat Kabar

481.32 Majalah

481.33 Buletin

481.4 Laporan dan Hasil Pemberitaan

481.41 Surat Kabar

481.42 Majalah

481.43 Buletin

481.44	Kegiatan Bidang
481.45	Grafika
482	Media Elektronik
482.1	RRI
482.2	Non RRI
482.3	ORARI
482.4	R A P I
482.5	T V R I
482.6	TV Swasta
482.7	Film
483	Reklame
483.1	Ketentuan Pemasangan
483.2	Penerbitan
483.3	Parneran Non Komersial
484	Kewartawanan
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Terjadinya Kasus Penghinaan, Pemukulan, Penganiyaan Terhadap Wartawan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan Kepada/Dari Organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Kebijakan Pimpinan Wartawan/Pendidikan Jurnalistik
484.7	Temu Pers/Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Wawancara/Audiensi Wartawan
485	Pencerangan
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian Information Center
486	Peningkatan Kapasitas Bidang Inforkom
486.1	Training Foto Grafi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Organisasi Kemasyarakatan
487.12	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.13	Bintek Pengurus LKM
487.14	Bahan Informasi Cetak LKM
487.15	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Media
487.16	Pelatihan Motivator Kapa Narkoba
487.17	Pembekalan LSM/Upaya PPBN
487.18	Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas
487.22	Pertemuan Kehumasan
487.23	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
487.3	Luar Negeri
487.31	Promosi Luar Negeri
487.32	Kunjungan Wartawan Asing

488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
488.1	Pembuatan Foto Blow Up Slide
488.2	Tayangan Udara tentang Kebijakan dan Hasil Pembangunan
488.21	Kran Info Grhadika
488.22	Halo Gubernur
488.23	Fokus Utama
488.3	Pelayanan Informasi Melalui Feature
488.4	Pelayanan Informasi Melalui Spot
488.41	Televisi
488.42	Radio
488.5	Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
488.51	Karawitan
488.52	Wayang Kulit
488.53	Guyon Maton
488.6	Dialog Interaktif
488.61	Televisi (TVRI), Nasional
488.62	Radio
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan
489.2	Klasifikasi Naskah Sambutan
489.3	Himpunan Dialog Interaktif
489.4	Himpunan Naskah Rubrik
489.5	Himpunan Naskah Keynote Speaker
489.6	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-
497	-
499	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuatu Bidang, klasifikasi pada masalahnya
504	-
505	-
506	-
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasi disini : Tataniaga

510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan Raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-Lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.16	Pasar
510.17	Pertokoan, kios, PKL
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera Ulang Ukuran
510.62	Takaran
510.63	Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat perjanjian/kontrak
510.73	Serah terima
510.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat tiga
510.92	Standar Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok, Tambahan kode wilayah beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dan sebagainya.
511.2	P a s a r
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan

- 512 Ekspor
 - 512.1 Ekspor Hasil Industri
 - 512.2 Ijin Ekspor
 - 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - 512.4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - 512.5 Ekspor Hasil Industri
 - 512.51 Kebijakan
 - 512.52 Pemasaran
 - 512.6 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - 512.7 Pengawasan Mutu Barang
 - 512.8 Eksportir Terdaftar
 - 512.9 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - 513. Ijin Import
 - 513.11 Pemberian Ijin
 - 513.12 Pengendalian Ijin
 - 513.2 Standart Mata Dagang Import
 - 513.3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - 513.4 Kegiatan Import
 - 513.41 Pembinaan Import
 - 513.42 Pengendalian Import
 - 513.43 Pemantauan Import
 - 513.5 Faktor-faktor Pendukung
 - 513.6 Pengawasan Mutu Barang Import
 - 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
 - 513.71 Bahan Konsumsi
 - 513.72 Bahan Baku
 - 513.73 Bahan Penolong
 - 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
 - 514.2 Industri Pemasaran
 - 514.3 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - 515.1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - 515.11 Promosi dan Informasi
 - 515.12 Pameran
 - 515.13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
 - 516.1 Peti kemas
 - 516.2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD lihat : 412.3 - 412.3)
 - 518.1 Bina Usaha Koperasi
 - 518.11 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
 - 518.111 Koperasi Pertanian Tanaman Pangan
 - 518.112 Koperasi Perkebunan

518.12	Koperasi Perikanan dan Peternakan
518.121	Koperasi Perikanan
518.122	Koperasi Peternakan
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.151	Koperasi Kelistrikan
518.152	Koperasi Industri
518.153	Koperasi Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Perangkaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
518.224	BPP KUD
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi KUD
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.234	Klasifikasi KUD Mandiri
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi KUD
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/Manager Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	TKST
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi KUD
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer

518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	PKKL
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	U K M (Usaha Kecil Menengah)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Kecil
518.312	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Kredit Usaha
518.321	Kredit Usaha Kecil
518.322	Kredit Usaha Menengah
518.3.3	Pengawasan Usaha
518.331	Pengawasan Usaha Kecil
518.332	Pengawasan Usaha Menengah

519 -

520 PERTANIAN

Tanaman Pangan

521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas / Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi :
521.21	Padi
521.211	Sawah
521.212	G o g o
521.213	H u m a
521.22	Palawija
521.221	Kacang
521.222	Jagung
521.223	Ketela Pohon
521.224	Ubi-Ubian
521.225	Kedelai
521.23	Hortikultura
521.24	Sayuran
521.25	Buah-Buahan
521.26	Tanaman Hias
521.27	Perlebahan
521.28	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dan sebagainya
521.33	Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Penyakit
521.411	Penyakit Daun

521.412	Penyakit Batang
521.42	Hama
521.421	Hama Serangga, diklasifikasikan : wereng, walang sangit, tungro
521.422	Hama Tikus dan Sejenisnya
521.43	Pemberantasan
521.44	Pestisida
521.5	Tanah Pertanian Pangan
521.51	Persawahan
521.52	Perladangan
521.53	K e b u n
521.6	Pengusaha, Petani
521.7	Lahan Kritis/KTA
521.8	Pemasaran :
521.81	Promosi
521.9	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
522	Kehutanan
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan Areal
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Ukur dan Pemetaan
522.231	Pengukuran
522.232	Perpetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	Areal HPH
522.312	SKHPH
522.313	Kerja Sama
522.314	Pembatalan/Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pernegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.333	Rencana Karya Lima Tahun RKPH
522.34	Perpanjangan HPH

522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Produksi Non-Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukangan
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang dilindungi
522.512	Satwa yang tidak dilindungi
522.513	Lembaga konservasi satwa.
522.514	Lembaga konservasi tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman Hutan Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan .
522.531	Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan Hutan
522.532	Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan Hutan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan

- 522.557 Hama dan Penyakit
- 522.558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
- 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 522.61 Pembenihan
- 522.611 Tegakan Benih
- 522.612 Pengadaan Benih
- 522.613 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 522.614 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 522.615 Pembibitan
- 522.616 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
- 522.617 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
- 522.62 Tanaman Reboisasi
- 522.621 Lahan Kritis
- 522.622 Reboisasi Lahan HPH
- 522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
- 522.624 Konservasi Tanah dan Air
- 522.625 Pengendalian Perladangan
- 522.626 Penghijauan
- 522.627 Aneka Usaha Kehutanan
- 522.63 Perhutanan Sosial
- 522.631 Sutera Alam
- 522.632 Minyak Kayu Putih
- 522.633 Perlebahan

- 523 Perikanan dan Kelautan
- 523.1 Rencana dan Program
- 523.11 Penyuluhan
- 523.12 Teknologi
- 523.2 Produksi Perikanan
- 523.21 Pelelangan
- 523.22 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan

- 523.3 Usaha Perikanan
- 523.31 Pembibitan
- 523.32 Daerah Penangkapan
- 523.33 Perizinan Pembudidayaan Ikan
- 523.4 Pemasaran
- 523.41 Eksport Komoditas Perikanan
- 523.5 Sarana Perikanan
- 523.51 Peralatan
- 523.52 Kapal
- 523.53 Pelabuhan
- 523.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
- 523.7 Pengusaha, Nelayan
- 523.71 Kapal/Motor Boat
- 523.72 Jaring
- 523.73 Cold Storage
- 523.74 Tempat Es
- 523.8 Konservasi dan Suaka laut

- 524 Peternakan
- 524.1 Produksi
- 524.11 Susu Ternak Rakyat
- 524.12 Telor
- 524.13 Daging

524.2	Sarana Usaha Peternakan
524.21	Pembibitan
524.22	Obat Hewan
524.23	Alsinak
524.24	Pakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan
524.33	Pemeriksaan Spesimen
524.34	Karantina
524.4	Pelayanan Usaha dan Pemasaran
524.41	Promosi Produksi Peternakan
524.42	Pemasaran Peternakan
524.43	Ijin Usaha Peternakan
524.5	Pengawasan dan Standarisasi
524.51	Rumah Potong Hewan
524.52	Laboratorium
524.53	Standarisasi Bibit Ternak
524.6	Pengembangan Peternakan
524.61	Inseminasi Buatan
524.62	Pembibitan
524.63	Kawasan Peternakan
524.64	Penyebaran Ternak
524.7	Data dan Informasi
524.71	Data Peternakan
524.72	Informasi Peternakan
524.8	Organisasi Peternakan
524.81	Asosiasi Peternakan
524.82	Kelompok Tani Ternak
525	Perkebunan
525.1	Rencana dan Program
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	T e h
525.23	Tembakau
525.24	T e b u
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
525.27	K o p i
525.28	Aneka Tanaman
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Pembibitan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Pupuk
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.6	Pengolahan lahan
525.61	Terasering
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan

526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelolaan Hasil Pangan
526.33	Pemasaran Hasil
526.34	Kemitraan
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan Pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.53	Sistem Informasi Pangan

527	-
528	-
529	-

530 PERINDUSTRIAN

530.1	Undang-undang Gangguan
-------	------------------------

531	Industri Logam
-----	----------------

532	Industri Mesin / Elektronik
-----	-----------------------------

533	Industri Kimia / Farmasi
-----	--------------------------

534	Industri Tekstil
-----	------------------

535	Industri Makanan / Minuman
-----	----------------------------

536	Aneka Industri / Perusahaan
-----	-----------------------------

536.1	Home Industri
-------	---------------

537	Aneka Kerajinan
-----	-----------------

537.1	Kerajinan Rakyat
-------	------------------

538	Usaha Negara
-----	--------------

538.1	Perjan
-------	--------

538.2	Perum
-------	-------

538.3	Persero
-------	---------

539	Perusahaan Daerah
-----	-------------------

540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN

541	Minyak Bumi/Bensin
-----	--------------------

541.1	Pengusahaan
-------	-------------

541.11	Eksplorasi
--------	------------

541.12	Kontrak Kerja
--------	---------------

541.13	Pengolahan
--------	------------

541.2	Penyaluran
-------	------------

541.3	Tangki, Pompa, Tanker
-------	-----------------------

542	Gas Bumi
-----	----------

543	Logam Mulia Intan, Emas, Perak
544	Logam
544.1	Timah
544.2	Alumunium, Boxit
544.3	Besi, Termasuk Besi Tua
544.4	Tembaga
545	Aneka Tambang/ Bahan Galian
545.1	Air Permukaan
545.2	Air Bawah Tanah
545.21	Perijinan
545.211	Sumur Artetis
545.212	Sumur Bor
545.213	Sumur Gali/Pasak
545.214	Mata Air
545.215	Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
545.22	Sumur Pantau
545.23	Pemasangan/Penyegelan Water Meter
545.24	Produksi/Nilai Perolehan Air (NPA)
545.25	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
546	Geologi
546.1	Vulkanologi
546.11	Pengawasan Gunung Berapi
546.2	Sumber Daya Mineral
546.3	Volkanologi
546.31	Pengawasan Gunung Merapi
546.32	Panas Bumi
546.4	Hidrogeologi
546.5	Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
546.6	Pengawasan, Pengendalian
547	Hidrologi
548	Kesamudraan
549	-

550 PERHUBUNGAN

551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan

551.34	Trayek
551.35	Sarana / Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.42	Lalu Lintas
551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana / Kapal
551.46	Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Feri
551.51	Sarana dan Prasarana / Kapal
551.52	Terminal
551.53	Pelabuhan
551.54	Trayek
551.55	Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan / Perbaikan
551.59	Perizinan
551.6	Perkereta-Apian
551.61	Sarana meliputi Lokomotif; Gerbong; Bogie
551.62	Prasarana (Jalan/Jembatan)
551.63	Trayek
551.64	Angkutan Penumpang
551.65	Angkutan Barang
551.66	Keselamatan
551.67	Kecelakaan
551.68	Perawatan/Perbaikan
551.69	Perizinan
552	Perhubungan laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
552.2	Perkapalan - Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah / Lokasi

552.32	Alur Layar
552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan / Gedung / Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan / Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	P o s
552.62	Minyak
552.63	Log
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan Pokok
552.66	Peti Kemas / EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	Bongkar Muat
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-Rambu/Mercu Suar
552.72	Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan /Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang / Kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana / Prasarana
552.84	Pembajakan / Penyeludupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553.1	Perhubungan Udara
553.11	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.12	Penerbangan Domestik
553.13	Penerbangan Luar Negeri

553.14	Penerbangan Haji
553.15	Penerbangan Charter/Non Reguler
553.16	Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah / Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan / Gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	P o s
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelaikan
553.51	Kelaikan Pesawat Udara
553.52	Kelaikan Peralatan Penunjang
553.53	Kelaikan Personil / Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-Rambu
553.62	Perakitan / Kalibrasi
553.63	Fasilitas Keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana / Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	SATPAM
553.84	Rally Udara / Lomba
553.9	Perizinan
553.91	Izin Terbang / Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	POS
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan Fasilitas
554.12	Rehabilitasi / Perawatan
554.13	Bina Usaha / Pengawasan / Penertiban
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah / Bangunan
554.16	Filатели
554.17	Asosiasi

554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa Pos
554.22	Jasa Titipan
554.23	Jasa Giro
554.24	Benda Pos / Perangko
554.25	Sampul Peringatan
554.26	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
554.32	Pembukaan Agen / Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyelundupan
555	Telekomunikasi
555.1	Telepon
555.11	Tetap
555.12	Bergerak
555.13	Wartel
555.14	IKR / G
555.2	USO
555.3	Telegram, Telex / SBB
555.4	Satelit
555.5	Stasiun bumi
555.6	Faksimile
555.6	Frekwensi dan Informatika
555.61	Amatir Radio
555.62	KRAP
555.63	Radio Siaran Lokal
555.64	Televisi Siaran Lokal
555.65	Radio Konsesi Lokal
555.66	Radio Base Station
555.67	ISPU (Internet Service Provider)
555.68	Warnet
555.7	Pembinaan / Penertiban / Pengawasan
555.71	Wartel
555.72	Frekwensi Radio Lokal
555.8	Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
555.9	Perizinan
555.91	Amatir Radio
555.92	KRAP
555.93	Radio Siaran Lokal
555.94	Televisi Siaran Lokal
555.95	Radio Konsesi Lokal
555.96	Radio Base Station
556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata,
556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata

556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan :
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	T a r i f
556.3	Travel Service :
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan/Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kernudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi :
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi/Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi :
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisataaan

557	Metereologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Peneropongan Bintang
558	-
559	-

560 TENAGA KERJA

560.1	Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutitnen Calon TKI/TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI/TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri

560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
562.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
562.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
563.1	Pendidikan Pekerja
563.11	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21	Tempat Pelatihan (BLK)
563.22	Instruktur Pelatih
563.23	Modu/Silabus dan Bahan Praktek
563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran
563.25	Sertifikat
563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Perburuhan/NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Perburuhan /NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan /NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan /NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER)
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4D / P4P)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4D / P4P)
565.2	Pernogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 566.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
- 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
- 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (ketel uap)
- 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566.84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
- 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam)

- 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
- 567.2 PHK Masal
- 567.3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567.4 Ijin Melakukan PHK
- 567.5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567.6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja Yang di PHK
- 567.7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK

- 568. Kesejahteraan Buruh
- 568.1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
- 568.11 Pemilihan Pekerja Teladan
- 568.2 Perumahan Pekerja
- 568.3. Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
- 568.4 Koperasi Pekerja
- 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
- 568.6 Perpustakaan Pekerja
- 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
- 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- 568.91 Lembaga Kerjasama Bipartid

- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
- 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- 569.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
- 569.5 Data tenaga Kerja Asing
- 569.6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
- 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- 569.9 Tenaga Kerja Asing Illegal

- 570 MODAL DOMESTIK**
- 570.1 Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
- 570.2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten

- 571 Modal Asing

- 572 Modal; Patungan (joint Venture)/ Penyertaan Modal

- 573 Pasar Uang dan Modal

- 574 Saham

- 575 -

576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan lalu lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/pemegang polis
585.5	Uang pertanggungan
586	Alat pembayaran Check, giro wesel, transfer
587	Fiscal -
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir

- 592.3 Bagi Hasil
- 592.31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
- 592.32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
- 592.33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- 592.4 Gadai Tanah
- 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
- 592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
- 592.43 Sengketa Gadai Tanah
- 592.5 Bimbingan dan Penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landreform (Y D L)

- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
- 593.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- 593.11 Sewa Tanah
- 593.111 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
- 593.2 Hak Milik
- 593.21 Perorangan
- 593.22 Badan Hukum
- 593.3 Hak Pakai
- 593.31 Perorangan
- 593.311 Warga Negara Indonesia
- 593.312 Warga Negara Asing
- 593.32 Badan hukum
- 593.321 Badan Hukum Indonesia
- 593.322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
- 593.33 Tanah Gedung-gedung Negeri
- 593.4 Guna Usaha
- 593.41 Perkebunan Besar
- 593.42 Perkebunan Rakyat
- 593.43 Peternakan
- 593.44 Perikanan
- 593.45 Kehutanan
- 593.5 Hak Guna Bangunan
- 593.51 Perorangan
- 593.52 Badan Hukum
- 593.53 P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
- 593.54 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/65
- 593.55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
- 593.6 Hak Pengeloan
- 593.61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
- 593.62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- 593.7 Sengketa Tanah
- 593.71 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
- 593.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- 593.81 Pencabutan Hak
- 593.82 Pembebasan Tanah
- 593.83 Ganti Rugi Tanah

- 594 Pendaftaran Tanah
- 594.1 Pengukuran / Pemetaan
- 594.11 Fotogrametri
- 594.12 Teristris
- 594.13 Triangulasi
- 594.14 Peralatan

594.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
594.3 Sertifikat
594.4 Pejabat Pembuat Akte Tanah

595 Transmigrasi
595.1 Tata Guna Tanah
595.2 Landreform
595.3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
595.4 Pendaftaran Tanah

596 -
597 -
598 -
599 -

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

601 Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi

602 Prakuifikasi
602.1 Daftar Rekanan Mampu
602.2 Tanda Daftar Rekanan
602.3 Kontraktor, Pemborong
602.4 Tender
602.5 Penunjukan
602.51 Penunjukan langsung

603 Arsitektur

604 Bahan bangunan
604.1 Tanah dan batu
604.2 Aspal
604.3 Besi dan logam lainnya
604.31 Besi beton
604.32 Besi profil (konstruksi)
604.33 P a k u
604.34 Aluminium Profil
604.4 Bahan-bahan pelindung dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
604.5 Semen
604.6 Kayu
604.7 Bahan penutup atap
604.8 Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya

605 Instalansi
605.1 Instalansi bangunan
605.2 Instalansi listrik
605.3 Instalansi air / sanitasi
605.4 Instalansi pengatur udara
605.5 instalansi akustik
605.6 Instalansi cahaya / penerangan

606 Konstruksi pencegahan
606.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2 Terhadap gempa
606.3 Terhadap angin / udara / panas

- 606.4 Terhadap kegaduhan
- 606.5 Terhadap gas / explosive
- 606.6 Terhadap serangga
- 606.7 Terhadap radiasi atom

- 607 -
- 608 -
- 609 -

610 **PENGAIRAN**

- 611 Irigasi
- 611.1 Bangunan Waduk
- 611.11 Bendungan
- 611.12 Tanggul
- 611.13 Pelimpahan banjir
- 611.14 Menara pengambilan
- 611.15 Pembangunan dermaga
- 611.2 Bangunan pengambilan
- 611.21 Bendung
- 611.22 Bendung dengan pintu bilas
- 611.23 Bendung dengan pompa
- 611.24 Pengambilari bebas
- 611.25 Pengambilan bebas dengan pompa
- 611.26 Sumur dengan pompa
- 611.27 Kantung lumpur
- 611.28 Silf Ekstretor
- 611.29 Escape chenel
- 611.3 Bangunan pembawa
- 611.31 Saluran
- 611.311 Saluran Induk
- 611.312 Saluran Sekunder
- 611.313 Suplesi
- 611.314 Tersier
- 611.315 Saluran Kwarter
- 611.316 Saluran Pasangan
- 611.317 Saluran tertutup / terowongan
- 611.32 Bangunan
- 611.321 Bangunan bagi
- 611.322 Bangunan bagi dan sadap
- 611.323 Bangunan sadap
- 611.324 Bangunan check
- 611.325 Bangunan terjun
- 611.33 Bax Tersier
- 611.34 Got miring
- 611.35 Talang
- 611.36 Syphon
- 611.37 Gorong-gorong
- 611.38 Pelimpahan samping
- 611.4 Bangunan Pembuangan
- 611.41 Saluran
- 611.411 Saluran Pembuang Induk
- 611.412 Saluran Pembuang Sekunder
- 611.413 Saluran Pembuang Tersier
- 611.42 Bangunan
- 611.42' 1 Bangunan out let

611.422	Bangunan terjun
611.423	Bangunan penahan banjir
611.43	Gorong-gorong pembuang
611.44	Talang pembuang
611.45	Syphon pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan Inspeksi
611.522	Jembatan hewan
611.53	Tangga cuci
611.54	Kubangan kerbau
611.55	Waduk lapangan
611.56	Bangunan penunjang
611.57	Jaringan telepon
611.58	Stasiun Agro
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Wan
612	Polder
612.1	Tanggul keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan penutup sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran muka
612.212	Saluran pembawa induk
612.213	Saluran pembawa sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22	Bangunan bagi :
612.221	Gorong-gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan pembuang
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran pembawa induk
612.322	Saluran Pembawa sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran
613.111	Saluran Pembawa Induk
613.112	Saluran Pembawa Sekunder
613.113	Saluran Pembawa Tersier

613.114	Saluran Penyimpanan Air
613.115	Bangunan Pintu Pemasukan
613.2	Bangunan Pembuang
613.21	Saluran
613.211	Saluran Pembawa Induk
613.212	Saluran Pembawa Sekunder.
613.213	Saluran Pembawa Tersier.
613.214	Saluran Penyimpanan Air
613.215	Bangunan Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.31	Kolom pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan

614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	K r i b
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Bangunan Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan

615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	K r i b
615.3	Bangunan lainnya

616	Air Tanah
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan lainnya

617	-
618	-

619

-

620 JALAN

- 621 Jalan Kota
- 621.1 Daerah Penguasaan
- 621.11 Tanah
- 621.12 Tanaman
- 621.13 Bangunan
- 621.2 Bangunan Sementara
- 621.21 Jalan Sementara
- 621.22 Kantor Proyek
- 621.23 Gedung Proyek
- 621.24 Barak Kerja
- 621.25 Laboratorium Lapangan
- 621.26 R u m a h
- 621.3 Badan Jalan
- 621.31 Pekerjaan Tanah (earth work)
- 621.32 Stabilisasi
- 621.4 Perkerasan
- 621.41 Lapisan Pondasi Bawah
- 621.42 Lapisan Pondasi
- 621.43 Lapisan Permukaan
- 621.5 Drainage
- 621.51 Parit Tanah
- 621.52 Gorong-gorong (culvert)
- 621.6 Buku Trotoir
- 621.61 Tanah
- 621.62 Perkerasan
- 621.63 Pasangan
- 621.7 Medium
- 621.71 T a n a h
- 621.72 Tanaman
- 621.73 Perkerasan
- 621.74 Pasangan
- 621.8 Daerah samping
- 621.81 Tanaman
- 621.82 Pagar
- 621.9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
- 621.91 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
- 621.92 Lampu Penerangan
- 621.93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- 621.94 Patok-patok KM
- 621.95 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
- 621.96 Rel Pengaman
- 621.97 P a g a r
- 621.98 Turap Penahan
- 621.99 Bronjong
- 622 Jalan Luar Kota
- 622.1 Daerah Penguasaan
- 622.11 Tanah
- 622.12 Tanaman
- 622.13 Bangunan
- 622.14 Jalan sementara

622.15	Jembatan sementara
622.16	Kantor/Gedung Proyek
622.17	Barak kerja
622.18	Laboratorium lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.31	Lapis Pondasi bawah
622.32	Lapis pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu Penerangan
622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R,O,W (sempadan)
622.86	Rel Pengaman
622.87	Pagar
622.88	Turap Penahan
622.89	Bronjong

623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-

630 J EMBATAN

631	Jembatan pada jalan Kota
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara

631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (eart work)
631.31	Galian tanah
631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi Kepala Jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi Angker
631.5	Bangunari bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan Pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap
631.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengaman
631.83	Patok R.O.W. (sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan pada jalan Luar Kota
632.1	Daerah penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan

632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan atas
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/trottoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Bangunan Penganian
632.71	Turap / penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Kriup
632.8	Bangunan Pelengkap
632.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok pengaman
632.83	Patok R.O.W. (sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun

633	-
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-
639	-

640 BANGUNAN

641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran

642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-Kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung Parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal Angkutan Udara
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti / Sederhana
648.12	Sedang / Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah contoh
648.3	Real estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	A t a p
649.4	Lantai / langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu hermonik.
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong

649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site & Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (home industri)
655	Daerah Rekreasi (open spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport & playing fields
655.3	Open space
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan jalan
656.11	Penerangan jalan
656.2	Jaringan kereta api
656.3	Jaringan sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpul
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduan
658.5	Kebersihan Kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup

660.2 Kebersihan Lingkungan
660.3 Pencemaran
660.31 Pencemaran Air
660.32 Pencemaran Udara

661 Daerah Hutan

662 Daerah Pertanian / Perkebunan

663 Daerah Pemukiman

664 Pusat Petumbuhan

665 Transportasi
665.1 Jaringan jalan
665.2 Jaringan kereta api
665.3 Jaringan sungai

666 -

667 -

668 -

669 -

670 KETENAGAAN

671 Listrik
671.1 Kelistrikan
671.11 Kelistrikan PLN
671.12 Kelistrikan non PLN
671.2 Pembangkit tenaga listrik
671.21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3 Transmisi Tenaga Listrik
671.31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
671.32 Saluran Udara Tenaga Tinggi
671.33 Kabel Bawah Tanah

671.4 Distribusi Tenaga Listrik
671.41 Gardu Distribusi
671.42 Tegangan Menengah
671.43 Tegangan Rendah
671.44 Jaringan Bawah Tanah
671.5 Pengusahaan Listrik
671.51 Sambungan Listrik
671.52 Penjualan Tenaga Listrik
671.53 Tarif Listrik

672 Tenaga Air

673 Tenaga Minyak

674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	-
682	-
683	-
684	-
685	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Surnur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (Blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi

694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir dibawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup pelepas (blow off)
694.8	Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
701	Pengawasan Urusan Dalam meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor
702	Pengawasan Peralatan
703	Pengawasan Kekayaan
704	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
705	Pengawasan Perencanaan Pengadaan/Proyek
706	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
707	Pengawasan Penelitian/Riset
708	Pengawasan Konferensi/Rapat Dinas
709	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat/PNS
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintahan Pusat
712	Pengawasan Pemerintahan Provinsi
713	Pengawasan Pemda Kabupaten/Kota
714	Pengawasan Pemerintah Desa
715	Pengawasan DPR/MPR/DPD
716	Pengawasan DPRD Provinsi
717	Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota

- 718 Pengawasan Hukum/Konstitusi/Peraturan Lain
- 719 Pengawasan Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK**
- 721 Pengawasan Partai
 - 721.1 Keanggotaan
 - 721.2 Pendirian/Pembubaran
 - 721.3 Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai
- 722 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 723 Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Pengawasan Organisasi Kepemudaan/Olah Raga
- 725 Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan
- 726 Pengawasan Organisasi Wanita
- 727 Pengawasan Pemilu
 - 727.1 Pemilu Legislatif dan DPD
 - 727.2 Pemilu Eksekutif/Presiden
- 728 Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai
- 729 Pengawasan Pendanaan Partai .
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**
- 731 Pengawasan Pertahanan
- 732 Pengawasan Keamanan
- 733 Pengawasan Penegak Hukum
- 734 Pengawasan Perlindungan Masyarakat
- 735 Pengawasan Penyimpangan Pejabat/PNS
 - 735.1 Persengketaan PNS
 - 735.2 Pembunuhan
 - 735.3 Penganiayaan/Perampokan/Pencurian
 - 735.4 Pemalsuan
 - 735.5 Tindakan Asusila/Pelecehan Seksual
 - 735.6 Korupsi/Penyalahgunaan Jabatan Struktural (lihat 356)
- 736 Pengawasan Bencana Alam
- 737 Pengawasan SAR/Bencana
- 738 Pengawasan Keamanan Aparat/Pejabat
- 739 Pengawasan Lingkungan Hidup

740 BIDANG KESRA

- 741 Pengawasan Pembangunan Desa
- 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 742.1 Kesejahteraan Guru
 - 742.2 Fasilitas/Sarana
 - 742.3 Mutu Pendidikan
- 743 Pengawasan Kebudayaan
 - 743.1 Kebudayaan Daerah/Nasional
 - 743.2 Kebudayaan Asing
- 744 Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
- 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi
- 748 Pengawasan Kehumasan / Media Massa
- 749 Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat

750 BIDANG PEREKONOMIAN

- 751 Pengawasan Perdagangan
- 752 Pengawasan Pertanian
- 753 Pengawasan Perindustrian
- 754 Pengawasan Pertambangan/Kelautan
- 755 Pengawasan Perhubungan
- 756 Pengawasan Tenaga Kerja
- 757 Pengawasan PMDN/PMA
- 758 Pengawasan Perbankan/Moneter
- 759 Pengawasan Pertahanan/BPN

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota

766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Peralatan
769	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
772	Serah Terima Jabatan Publik
773	Laporan Pertanggungjawaban Pusat
774	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
775	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota
776	Penolakan LPJ
777	Penyimpangan Pejabat Publik
778	Komisi Penieriksa Kekayaan Pejabat Negara
779	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi
783	Pengawasan Kedudukan / Jabatan
784	Pengawasan Kesejahteraan PNS
785	Pengawasan Cuti
786	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
787	Pengawasan Pemberhentian PNS
788	Pengawasan Tata Usaha / Administrasi PNS
789	Pengawasan Pendidikan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran / APBD
792	Pengawasan Otorisasi
793	Pengawasan Verifikasi

794	Pengawasan Pembukuan
795	Pengawasan Perbendaharaan
796	Pengawasan Pembinaan Perbendaharaan
797	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak
798	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
799	Pengawasan Bendaharawan / Pemegang Kas
800	KEPEGAWAIAN
	Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.21	Pengaduan
800.22	Team
800.23	Statistik
800.24	Peraturan Perundang-undangan
810	PENGADAAN
	Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai.
811	Lamaran
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Panggilan
812	Pengujian kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
813.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
813.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
813.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
813.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
813.5	Pengangkatan Calon Guru
814	Pengangkatan Tenaga Harian Lepas
814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan
814.2	Pengangkatan Tenaga Harian
815	Pengangkatan Tenaga Asing
816	Pengangkatan Tenaga Kontrak
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI
820.1	Golongan I
820.2	Golongan II
820.3	Golongan III
820.4	Golongan IV
820.5	Fungsional

821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (tetap)
821.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol I
821.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol II
821.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol III
821.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol IV
821.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan
821.21	Sekjen / Dirjen / Kaban/Sekda/Sekdan/Asekda
821.22	Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor
821.23	Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang /Inspektur Pembantu
821.24	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Pemeriksa/UPTD/UPPD
821.25	Residen / Pembantu Gubernur
821.26	Wedana / Pembantu Bupati
821.27	Camat
821.28	Lurah Administratif
821.29	Jabatan lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	Pegawai Golongan I
822.2	Pegawai Golongan II
822.3	Pegawai Golongan III
822.4	Pegawai Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
823.1	Pegawai Golongan I
823.2	Pegawai Golongan II
823.3	Pegawai Golongan III
823.4	Pegawai Golongan IV
824	Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
824.1	Pegawai Golongan I
824.2	Pegawai Golongan II
824.3	Pegawai Golongan III
824.4	Pegawai Golongan IV
824.5	Lolos Butuh
825	Detasering Dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
826.5	Ijin belajar
827	Wajib Militer
828	Mutasi Pegawai Instansi lain
829	-
830	KEDUDUKAN
831	Perhitungan masa kerja

832	Penyesuaian pangkat / gaji
832.1	Pegawai Golongan I
832.2	Pegawai Golongan II
832.3	Pegawai Golongan III
832.4	Pegawai Golongan IV
833	Penghargaan ijasah
834	Penghargaan Teknologi Tepat Guna
835	Penghargaan Humas
836	Penghargaan Lingkungan Hidup
837	Penghargaan Kemanusiaan
838	Penghargaan Kewirausahaan
839	Penghargaan Kesenian
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
840.1	Meliputi tunjangan
841	Tunjangan
841.1	Jabatan
841.2	Kehormatan
841.3	Kematian
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas Tetap / Cuti / Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Pangan, uang makan
842	D a n a
842.1	Taspen
842.2	Kesehatan
842.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844.1	Distribusi Pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi lainnya
845	Perumahan / Tanah
845.1	Perumahan pegawai
845.2	Tanah Kapling
845.3	Losmen / Hotel
846	Bantuan Sosial
846.1	Bantuan Kebakaran

846.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi
848	Dispensasi
849	-
850	C U T I
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan lain
858	-
859	-
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana
861.2	Kenaikan pangkat anumerta
861.3	Kenaikan gaji istimewa
861.4	Hadiah berupa pangkat
861.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Tegoran / peringatan
862.2	Penundaan kenaikan gaji
862.3	Penurunan pangkat
862.4	Pemindahan
863	Konduite
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
866	Rehabilitasi
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN

871	Formasi
872	Bezetting
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / tanda pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU/KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian nama
874.3	Kepartaian / organisasi
875	Kewenangan mutasi kepegawaian
875.1	Pelimpahan wewenang
875.2	Spesimen tanda tangan
876	Penggajian
876.1	SKPP
877	Sumpah / janji
878	Korps Kepegawaian
879	-
880	PEMBERHENTIAN
881	Permintaan sendiri
882	Dengan hak pensiun
882.1	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. I
882.2	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. II
882.3	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. III
882.4	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol. IV
882.5	Pensiun janda / duda
882.6	Pensiun yatim piatu
882.7	Uang muka pensiun
883	Karena meninggal
883.1	Karena meninggal dalam tugas
884	Alasan lain
885	Uang pesangon
886	Uang tunggu
887	Sementara waktu
888	Tidak dengan hormat
889	-
890	PENDIDIKAN PEGAWAI

891	Perencanaan
892	Pendidikan reguler
892.1	I I P
892.2	Akademi
892.21	Agraria
892.22	Pemerintahan Dalam Negeri
892.3	Kursus-kursus reguler
893	Pendidian Non Reguler
893.1	SESPA/Diklat
893.2	SELAPUTDA
893.3	Kursus-Kursus/ Penataran
894	Pendidikan ke luar negeri
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah lapangan, Widya wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar
897	Akademi pendidikan
897.1	Tahun pelajaran
897.2	Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian
898	Fasilitas
898.1	Tunjangan belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang makan
898.4	Uang transport
898.5	Uang buku
899	Sarana
899.1	Buku
899.2	Gedung
900	KEUANGAN
901	-
902	-
903	-
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN

911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	DIK
915	DIP
916	RASK
917	DASK Dokumen
918	-
919	-
920	OTORISASI
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
923.1	SIAPDA
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (Daftar P8)
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6-P7)
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Dana Anggaran Laporan Fisik Pembangunan

943 -
944 -
945 -
946 -
947 -
948 -
949 -

950 PERBENDAHARAAN

951 Tuntutan Ganti Rugi (1CW Pasa174)
952 Tuntutan Perbendaharaan
953 Penghapusan Kekayaan Negara
954 Pengangkatan/Pergantian Perbendaharaan
955 Specimen Tandatangan
956 Surat Tangguhan Piutang
957 -
958 -
959 -

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963 Laporan Keuangan Bendaharawan
964 -
965 -
966 -
967 -
968 -
969 -

970 PENDAPATAN

971 Perimbangan Keuangan
971.1 Bagi hasil pajak
971.11 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
971.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasa121)
971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21 Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
971.22 Provisi Sumber Daya Hutan
971.23 Sumber Daya Alam Migas
971.24 luran Eksplorasi Landrent
972 Subsidi

973	Pajak
973.1	Pajak kendaraan:
973.2	Pajak kendaraan bermotor
973.3	Bea balik nama kendaraan bermotor
973.4	Bea balik nama kendaraan diatas air
973.5	Pajak bahan kendaraan bermotor
973.6	Pajak pengembalian dan pemanfaatan ABT
973.7	Pajak Pengambilan dan pemanfaatan AP
974	Retribusi
974.1	Retribusi pelayanan kesehatan
974.2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah
974.3	Retribusi tempat pelelangan ikan
974.4	Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan/villa
974.5	Retribusi penjualan produksi usahadaerah
974.6	Retribusi hasil hutan
974.61	Pengendalian kayu lintas kabupaten/kota
974.62	Ijin pemanfaatan flora dan fauna
974.63	Tempat pelelangan hasil hutan
974.7	Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT/AP
974.8	Retribusi bidang metrologi
974.9	Retribusi penyelenggaraan perhubungan
974.91	Ijin trayek
974.92	Penyelenggaraan telkom
974.93	Dispensasi kelebihan muatan
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)

979.41	Sumbangan Pihak ke tiga
979.42	Sumbangan Pihak ke tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak ke tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-Lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving
979.55	Kerjasama dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan DUKS
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Setoran TP-TGR
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas

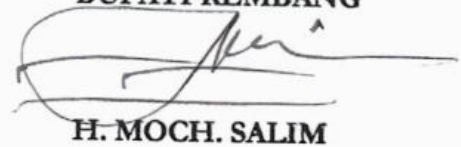
980 PENGELUARAN

981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-

990 BENDAHARAWAN

991	SKPP
992	Tegoran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

979.41	Sumbangan Pihak ke tiga
979.42	Sumbangan Pihak ke tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak ke tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-Lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving
979.55	Kerjasama dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan DUKS
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Setoran TP-TGR
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas

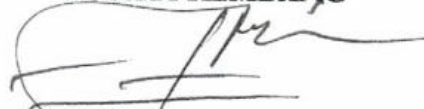
980 **PENGELUARAN**

981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-

990 **BENDA HARAWAN**

991	SKPP
992	Tegoran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SILDA	
ASIS	
KA. BUKU	
BADAN / DINAS	
INSTANSI / KANTOR	